

Jurnal Enersia Publika, Vol. 3, No. 1, Juni 2019, hal 1-14

ANALISIS PERENCANAAN PENANGGULANGAN RESIKO KETIMPANGAN EKONOMI PADA BIDANG PENGURANGAN KEMISKINAN DI BAPPEDA DIY

Puput Tri Wahyuningsih, Idham Ibtu

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

Korespondensi penulis: putriwahyush@gmail.com, idham.ibty@gmail.com

Abstrak

Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami ketimpangan ekonomi yang masih tergolong ketimpangan sedang secara nasional. Konsistensinya cenderung meningkat dari tahun 2013-2018. Pesebaran pembangunan dan pemerataan ekonomi, sarana pendidikan dan kesehatan belum merata. Ketimpangan antar daerah masih terasakan di antara Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Bantul, dengan Kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul. Salah satu prioritas arah kebijakan untuk atasi ketimpangan tersebut adalah membangun pekonomian yang inklusif dengan mengurangi kemiskinan di DIY. Permasalahannya adalah bagaimana perencanaan daerah dalam menanggulangi resiko ketimpangan ekonomi pada bidang pengurangan kemiskinan?.

Penelitian ini bertujuan: pertama, mencermati mekanisme perencanaan Bappeda DIY dalam penanggulangan risiko ketimpangan ekonomi, dari bidang pengatasan kemiskinan. Kedua, mengetahui tata cara penerapan pengelolaan risiko pada penyusunan rencana penanggulangan ketimpangan ekonomi dari bidang pengatasan kemiskinan. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur, wawancara mendalam, dan uji sah dengan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan Bappeda DIY melaksanakan perencanaan penanggulangan ketimpangan ekonomi sesuai dengan tahapan perencanaan daerah, dan menerapkan tata cara pengelolaan risiko ketimpangan ekonomi dalam perencanaan program penanggulangan kemiskinan secara baik. Hal tersebut dapat berjalan dengan adanya komitmen pimpinan dan para perencana dan para pihak berkepentingan yang dilibatkan seperti organisasi masyarakat, kelompok warga miskin, KADIN, perguruan tinggi dan LSM, yang dapat terfasilitasi saling bersinergi. Selain itu dibuka akses informasi publik melalui aplikasi jogjaplan.com yang berfungsi juga untuk berbagi informasi, pengetahuan, aspirasi dan penanganan keluhan dari semua pihak dalam perencanaan daerah. Sedangkan hambatan yang teridentifikasi yaitu kesadaran warga yang dimiliki oleh kelompok swadaya, pimpinan pihak-pihak berkepentingan, terutama anggota organisasi berbasis warga menjadi pelaku perubahan sosial-ekonomi secara aktif dan mandiri.

Kata Kunci: Perencanaan, Ketimpangan Ekonomi, Pengelolaan Risiko, Pengurangan Kemiskinan

Abstract

The Yogyakarta Special Region is affected by economic inequality which is classified as medium inequality nationally. Its consistency tended to increase from 2013-2018. The spread of development and economic equality, education and health facilities are not evenly distributed. Region inequality is still felt between the cities of Yogyakarta, Sleman and Bantul, and Kulon Progo and Gunung Kidul. One of DIYs' public policy priorities for solving economic inequality is to build an inclusive economy by strategizing the poverty reduction in DIY. The problem is how regional planning in overcoming the risk of economic inequality due to poverty reduction?

This study aims: first, to look at the planning mechanism of Bappeda DIY in overcoming the risk of economic inequality, in the area of poverty alleviation. Secondly is knowing the procedures for implementing risk management in the planning for overcoming economic inequality on program of poverty reduction. This research use qualitative methods. Data collection is done by method of literature study, in-depth interviews, and validity testing with triangulation.

The result of study show that Bappeda DIY implements economic inequality management planning in accordance with the stages of regional planning, and applies procedures for risk managing on economic inequality in poverty reduction program planning. This can be done on caused by the commitment of leaders of Bappeda and Dines, planners and their engagement to stakeholders involved, such as community based organizations, the self help groups, the Chamber of Comers, universities and local NGOs, which can be facilitated to work together. In addition, public information access is opened through the jogjaplan.com application which also functions to share information, knowledge, aspirations and complaints handling from all parties in regional planning. Whereas the identified obstacles i.e. civic-awareness owned by the self help groups, the leaders of the multi-stake holders, especially member of community based organizations to be the subject of socio-economic changes actively and independently.

Keywords: Planning, Economic Inequality, Risk Management, Poverty Reduction

A. Latar Belakang

Berdasarkan data dari Bank Indonesia (2018), angka gini rasio Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017 adalah sebesar 0,425. Angka gini rasio Daerah Istimewa Yogyakarta berada lebih tinggi dari angka gini nasional sebesar 0,394. Dari tahun 2013 angka gini rasio DIY cenderung terus naik. Sementara jika dilihat Derajat Otonomi Fiskal (DOF), sebagai angka perolehan pendapatan yang bersumber dari SDA dan SDM yang dimiliki suatu daerah, di DIY dari keberadaan Kota Yogyakarta diposisi pertama dengan DOF sebesar 38,30%, di ikuti Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan terendah Gunungkidul sebesar 14,55% (BI., 2018).

Gini rasio semester pertama pada Maret 2018, menunjukkan terbawah, 14,32%. Pengukuran Bank Dunia menyatakan ketimpangan Daerah Istimewa Yogyakarta masih terhitung ketimpangan sedang (BPS, 2018). Hal ini dijadikan dasar penyusunan Rencana Strategis Pemerintah Daerah yang berpedoman pada RPJMD DIY 2017-2022, yang menyatakan bahwa usaha pemerintah di tahun-tahun sebelumnya dalam menanggulangi ketimpangan dinilai kurang tepat sasaran, karena adanya perbedaan data antara masyarakat sebagai penerima manfaat dan Pemda.

Pemerintah daerah perlu menangani masalah ketahanan ekonomi sedini mungkin.

Ketahanan ekonomi daerah perlu rencana penanggulangan risiko yang dilakukan guna mengurangi ketimpangan ekonomi. Seperti diketahui ketimpangan tersebut dapat berdampak pada meningkatnya kriminalitas, berkurangnya tingkat keamanan, serta krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Sementara itu, ketimpangan ekonomi di DIY distrategikan dengan arah kebijakan Pemerintah DIY dengan peningkatan ketahanan ekonomi, yang salah satunya melalui pengurangan kemiskinan (RPJMD DIY, 2017-2022). Permasalahannya adalah bagaimana perencanaan daerah dalam menanggulangi resiko ketimpangan ekonomi pada bidang pengurangan kemiskinan?.

Adapun tujuan penelitian adalah mencermati mekanisme perencanaan Bappeda DIY dalam penanggulangan risiko ketimpangan ekonomi, dari bidang pengatasan kemiskinan, dan mengetahui tata cara penerapan pengelolaan risiko pada penyusunan rencana mengatasi ketimpangan ekonomi dari program penanggulangan kemiskinan.

B. Tinjauan Pustaka

B.1 Perencanaan

Perencanaan adalah penyusunan aktifitas sebagai solusi mengatasi masalah, untuk rencana kinerja pemerintahan yang baik dari

aspek social, ekonomi, maupun budaya yang berjalan berdampingan dengan kelestarian lingkungan di wilayah suatu masyarakat berada (Ernan. R (2018). Hal itu merupakan suatu proses mempersiapkan keputusan-keputusan yang akan dilaksanakan di periode waktu mendatang dengan mengarah pada suatu sasaran yang ingin dicapai, yang perlu mempertimbangkan berbagai aspek untuk dikelola secara baik, dengan mengoptimalkan modal sosial dan sumber daya yang dimiliki untuk dirancang pengelolaannya secara berkelanjutan Kunarjo (2002).

Definisi lain perencanaan menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1998) adalah menyiapkan cara untuk mencapai tujuan dengan sebaik mungkin (*maximum output*) dengan menggunakan sumber daya yang ada agar berhasil secara efektif dan efisien. Irma, P. (2008) menyebutkan bahwa perencanaan dimaksudkan pula untuk mencapai sasaran dengan mempersiapkan sistem, program yang akan dilakukan dan siapa yang melaksanakannya.

Sedangkan perencanaan pembangunan ekonomi daerah memerlukan persiapan dengan memberikan solusi terkait isu-isu ekonomi yang dihadapi suatu daerah baik jangka pendek maupun jangka panjang. Juga perlu dilakukan evaluasi kebijakan yang memiliki

kemungkinan tidak tepat sasaran. Sehingga pembangunan ekonomi daerah merupakan pendukung dari pembangunan daerah secara kompleks. Terdapat dua prinsip dasar untuk mengembangkan ekonomi daerah, yaitu (1) mengenali ekonomi daerah tersebut; dan (2) manajemen pembangunan daerah yang dirumuskan secara pro-bisnis dan masyarakat (Darwanto, H. (2002).

Dengan demikian perencanaan ekonomi daerah merupakan tahapan awal dalam proses pembangunan suatu daerah, dengan memperhatikan keputusan yang bersumber dari kondisi obyektif pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha secara sah. Para perencana dan para pihak yang berkepentingan perlu konsistensi dalam mengimpelementasikan kebijakan agar tujuan dapat tercapai sesuai arah kebijakan dari sumber dasar perencanaan baik RPJMD maupun turunannya. Dalam hal ini adalah RPJMD DIY 2017-2022. Perencanaan tersebut dikatakan baik (Ernan. R (2018; Tjokroamidjojo (1998); Darwanto, H. (2002) jika telah memenuhi:

- a. Berdasar sumber data sesuai fakta
- b. Menjadi solusi permasalahan yang mendasar, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.

- c. Memanfaatkan dan mengembangkan Sumber Daya Alam dan sumber daya lainnya yang tersedia
- d. Adanya konsistensi perencanaan dalam implementasi program

B.2 Pengelolaan Risiko

Risiko menurut Hanafi, M.M. (2014) memiliki konotasi negatif, sesuatu yang tidak disukai, dan ingin di hindari. Definisi risiko sebagai kejadian yang merugikan, sesuatu ketidakpastian yang tidak diinginkan. Seringkali digunakan para analis investasi sebagai peluang yang akan diperoleh menyimpang dari yang diharapkan. Penyimpangan tersebut dapat menjadi alat pengukuran secara kuantitatif atau kualitatif sebagai indikasi adanya potensi risiko atau penyimpangan sehingga terjadi kerugian bahkan korban jiwa, sehingga dapat digunakan untuk mengukur risiko.

B.3 Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan ekonomi dipahami pula dengan kesenjangan distribusi pendapatan, yang dapat diartikan sebagai perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin, hal ini tercermin dari adanya perbedaan pendapatan (Baldwin, 1986). Kuncoro, M. (2013) dalam studi empirisnya

menjelaskan dua jenis ketimpangan yang menjadi pusat perhatian. (1) Ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan yang diukur dengan indeks rasio gini. Ketimpangan semakin meningkat jika distribusi pendapatan semakin melebar sebagaimana tercermin dalam rasio gini tiap tahunnya; (2) Ketimpangan antar daerah karena perekonomian selama lebih lima dasawarsa ini berpusat di kawasan barat Indonesia dibanding perekonomian kawasan timur Indonesia. Ketimpangan ekonomi berisiko meningkatnya kriminalitas, pengangguran dan naiknya angka kemiskinan, sampai dengan meluasnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Syawie, M. J., 2013). Dengan demikian ketimpangan ekonomi adalah kesenjangan pendapatan dan pengeluaran antar warga masyarakat, serta perbedaan tingkat pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi dan pembangunan sektor lainnya.

B.4 Kemiskinan

Komite Penanggulangan Kemiskinan (2005) mendefinisikan kemiskinan dari pendekatan hak. Kemiskinan dipandang sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki atau perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Adapun penyebab kemiskinan menurut Ardiansyah (2009) karena tingkat urbanisasi yang tinggi. Dengan latar belakang fasilitas pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja yang minim di perdesaan menjadi penyebab warga desa mengembara ke kota. Sementara mereka juga susah mendapat peluang pekerjaan. Hal ini dikarenakan kemampuan yang tidak memenuhi standar kualifikasi pekerja di kota. Definisi lain dari Badan Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Nasional (2004) menyatakan kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau kelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya masing-masing untuk bertahan hidup dan mempertahankan hak dan martabatnya. Hak dasar setiap warga masyarakat adalah sama, yaitu kebutuhan pokok makanan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, tempat tinggal, sumber daya alam seperti air bersih dan lingkungan hidup yang sehat, perasaan aman dari tindak kejahatan, kekerasan, dan setiap masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan bersosial dan politik (Kamal Idris, dkk. 2014).

Oleh karena itu, perencanaan penanggulangan risiko ketimpangan ekonomi (Koncoro, M., 2013) bermakna penting sebagai langkah awal dalam proses penetapan kebijakan yang bertujuan untuk menanggulangi kesenjangan

pendapatan maupun perbedaan distribusi pembangunan.

Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang RPJMD 2017-2022, maka perencanaan daerah merupakan salah satu tahapan pembentukan kebijakan dan rencana program secara sistemik dengan tata pemerintahan yang baik untuk mencapai tujuan ketahanan ekonomi, yang dapat menjadikan warga Yogyakarta bermartabat sesuai visi-misi Pemerintah DIY.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Lokus dan fokusnya pada perencanaan di Bappeda DIY dan bidang program penanggulangan kemiskinan di Dinas Sosial DIY dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang terkait. Pengumpulan data dilaksanakan dengan mengolah data sekunder dan data primer melalui wawancara terhadap pimpinan Bappeda DIY dan para pihak di atas. Metodenya dilakukan dengan studi dokumen publik seperti peraturan perundangan, laporan kinerja dan dokumen lainnya. Selain itu dilakukan wawancara mendalam. Sedangkan uji sahnya dilakukan dengan pengujian validitas data dengan menggunakan teknik triangulasi terhadap sumber data dari organisasi-organisasi yang berkaitan dengan

tujuan penelitian yaitu pada proses perencanaan yang telah dilakukan Bappeda terferifikasi oleh pihak-pihak terkait seperti Dinas Sosial, Kadin D.I.Yogyakarta, LSM Satu Nama, KSM Breksi dan lainnya. Sedangkan teknik analisis data dilakukan secara deskriptif dan pengambilan kesimpulannya secara induktif.

D. Hasil dan Pembahasan

D.1 Prioritas Perencanaan Bappeda DIY

Prioritas perencanaan pemerintah daerah adalah melakukan pembangunan, dengan infrastruktur sebagai prioritasnya. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan laju perekonomian dan kemudahan akses bagi masyarakat dalam pembangunan, dan diharapkan dapat mengembangkan perekonomian masyarakat disekitarnya.

Target penurunan ketimpangan ekonomi melalui penurunan angka kemiskinan adalah dari 11% menjadi 7% di tahun 2022.

Prioritas Bappeda DIY sesuai Arah Kebijakan yang sesuai strategi untuk mencapai sasaran Visi dan Misi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tertuang pada RPJMD DIY 2017-2022. Tujuan perencanaan tertuju pada meningkatkan kualitas hidup, dan kehidupan warga secara bermartabat menghadapi Abad Samudera Hindia dan era digital masyarakat

karena penggunaan internet oleh masyarakat, dunia swasta dan pemerintahan secara global.

Adapun sasaran perencanaan daerah, seperti dilaporkan pada LKJIP Bappeda (2018) adalah meningkatkan derajat kualitas SDM, terpelihara dan berkembangnya kebudayaan, meningkatkan aktivitas perekonomian yang inklusif berkelanjutan dan menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah. Prioritas perencanaan pengembangan ekonomi sebagai bentuk upaya penanggulangan ketimpangan melalui pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Bappeda DIY, diselenggarakan bersama-sama OPD terkait, demi mensukseskan target perencanaan seperti tertuang di dokumen RPJMD DIY 2017-2022, Renstra Bappeda 2017-2019 dan RKPD.

D.2 Implementasi Prioritas Perencanaan Pembangunan Daerah

Implementasi prioritas perencanaan pembangunan ekonomi difokuskan di tiga Kabupaten, Kulonprogo, Bantul, Gunungkidul. Perencanaan dilakukan dengan melakukan pendekatan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk pencapaian pelaksanaan perencanaan dengan baik. Hasil perencanaan prioritas tersebut sebagai turunan dari RPJMD DIY 2017-2022 mencakup:

1. Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan yang menghubungkan Kulonprogo, Bantul, Gunungkidul.
 2. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto
 3. Pembangunan Bandara *New Yogyakarta International Airport* di Kabupaten Kulonprogo.
 4. Pembangunan akses Bandara *New Yogyakarta International Airport*.
 5. Underpass Gejayan, Monjali, dan Kentungan
 6. Pemberdayaan kawasan pesisir dan desa wisata.
 7. Pengembangan pariwisata dengan pemberdayaan masyarakat
 8. Memberikan bantuan UEP PKH Graduasi - dilaksanakan Dinas Sosial
 9. Dinas Koperasi dan UKM melaksanakan program penumbuhan dan pengembangan UMKM.
- (Sumber: wawancara Kepala Bidang Perekonomian, Ibu Traitmi Heruwarsi, S.E: 16 Mei 2019 dan Perda RPJMD DIY)

Berkaitan dengan perencanaan untuk penanggulangan ketimpangan ekonomi melalui penurunan angka dan penanggulangan kemiskinan diperlukan strategi dan aktifitas pemberdayaan. Penelitian Ibtu I. (2017) memperkuat hasil kajian tersebut. Ibtu, I melaporkan bahwa strategi dan efektifitas pemberdayaan perlu perencanaan yang melibatkan multi pihak berkepentingan. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan (a) mengubah pola pikir masyarakat agar lebih produktif dan mandiri; (b) meningkatkan

kualitas SDM berkompetensi; (c) meningkatkan kualitas kelembagaan warga masyarakat; (d) mengaktifkan tokoh warga terlibat dalam penyusunan kembali Rencana Detail Tata Ruang dan perencanaan terkait pengembangan kawasan.

Kondisi yang objektif dari permasalahan kemiskinan yang merupakan isu strategis sehingga menjadi program prioritas perencanaan oleh Bappeda DIY, menjadikan upaya pelibatan multi pihak berkepentingan dalam pelaksanaannya. OPD terkait telah ikut terlibat merencanakan berbagai program untuk mendukung keberhasilan penanggulangan risiko ketimpangan agar kemiskinan dapat tertangani dengan sasaran menjadi 7% pada tahun 2022. Bappeda DIY memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi dengan mengembangkan sistem informasi perencanaan dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan aplikasi jogjaplan.com, yang berfungsi sebagai sistem pendukung perencanaan pembangunan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menunjang proses pelaksanaan perencanaan secara terintegrasi, transparan dan akuntabel.

D.3 Tahapan Penyusunan Perencanaan Penanggulangan Ketimpangan

Penyusunan perencanaan penanggulangan kemiskinan mengikuti sistem perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Bappeda DIY, mulai dari pembuatan RPJMD, Perencanaan Strategis sampai dengan RKPD. Keseluruhannya kemudian dituangkan pada produk perencanaan.

Prioritas perencanaan dengan tujuan meningkatkan ketahanan perekonomian masyarakat misalnya dengan pembangunan infrastruktur, dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh OPD bersangkutan. Hal ini dilaksanakan demi tercapainya target penurunan angka ketimpangan dari 11% menjadi 7% di tahun 2022. Impelentasi prioritas perencanaan dilaksanakan di tiga Kabupaten yaitu Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul. Berfokus di limabelas kecamatan yang terdiri dari: Gunungkidul fokus di Kecamatan Saptosari, Gedangsari, Tepus, Playen, Girisupo, Nglipar, Semin; Kulonprogo di Kecamatan Kokap, Sentolo, Samigaluh, Nglendah, Girimulyo; Bantul di Imogiri dan Pajangan, Sleman berlokasi di Tempel.

Adapun tahapan penyusunan perencanaan penanggulangan risiko ketimpangan ekonomi dilakukan melalui:

- a. Pemetaan dengan sumber data ketimpangan berdasarkan PDRB Badan Pusat Statistik dan dokumen yang sah lainnya.
- b. Perencanaan berfokus pada yang lemah dan membutuhkan perhatian lebih.
- c. Melihat keunggulan hasil panen atau Sumber Daya Alam yang menjadi sektor utama di suatu daerah dan dapat dimanfaatkan dan dikembangkan oleh masyarakat.
- d. Terlaksananya pelatihan, pendampingan, serta bimbingan teknis dan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.
- e. Pembangunan infrastruktur demi menunjang pertumbuhan perekonomian di daerah yang mejadi prioritas pembangunan. (LKIP Bappeda, 2018).

Menurut Kepala Bidang Perekonomian, Ibu Triatmi Heruwarsi, S.E., penyusunan rencana penanggulangan ketimpangan yang dilakukan Bappeda DIY telah memenuhi ketentuan-ketentuan dari tahapan perencanaan pembangunan ekonomi. Data kemiskinan berasal dari sumber terpercaya, berfokus pada priritas pemanfaat yang lemah dan membutuhkan perhatian lebih. Serta memanfaatkan keunggulan hasil panen atau ketersediaan Sumber Daya Alam yang dapat dimanfaatkan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia untuk menselaraskan program

agar berjalan dengan baik dan menghasilkan peningkatan. Pembangunan infrastruktur yang sedang dalam proses pengerjaan menjadi pendukung utama keberlanjutan kehidupan masyarakat yang lebih baik (Sumber: Dept in, Ibu Triatmi Heruwarsi: 16 Mei 2019).

D.4 Penerapan prinsip dan azas perencanaan dengan manajemen risiko

Perencanaan dengan penerapan prinsip pengelolaan risiko ketimpangan ekonomi telah dimanfaatkan dengan pengembangan masyarakat melalui pemberdayaan secara hati-hati, pendampingan dari pihak-pihak swasta maupun LSM dan praktisi yang telah mentas dalam usaha untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat yang masih dibawah garis kemiskinan. Setiap lapisan masyarakat berperan serta dalam pengentasan kemiskinan.

Sedangkan penghambat perencanaan penanggulangan risiko ketimpangan ekonomi telah diatasi dengan pemerinah tetap melaksanakan program-program yang telah direncanakan disertai pelaksanaan evaluasi. Keberhasilan maupun kegagalan program perencanaan penanggulangan kemiskinan tergantung kerjasama dari seluruh pihak terakait masyarakat yang menjadi pemeran utama agar pemberdayaan serta perbaikan ekonomi dapat terlaksana.

D.5 Manfaat Perencanaan Pengelolaan Risiko

Program perencanaan ketahanan ekonomi untuk mengatasi ketimpangan pembangunan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan distribusi yang merata antar daerah khususnya di bagian selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk penanggulangan dan mengurangi angka kemiskinan dinytakan dapat mencapai hasil positif pada penurunan angka ketimpangan di sektor ekonomi maupun wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui penurunan angka kemiskinan.

Untuk pembangunan infrastruktur sebagai pengungkit bermakna bahwa program yang dilaksanakan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk ikut terlibat, mendukung program bahkan berkontribusi atas keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan demi mengatasi ketimpanagn ekonomi yang terjadi.

Penyelenggaraan sistem perencanaan dalam menanggulangi ketimpangan akibat kemiskinan terdapat manfaat berupa: (1) Meminimalisir terjadinya kecemburuan sosial yang lebih tinggi; (2) Pemberdayaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada;

(3) Pembangunan infrastruktur dapat dilaksanakan secara fokus dan sesuai kebutuhan masyarakat; (4) Bertambahnya wawasan dan pengetahuan warga masyarakat dalam mengelola fasilitas umum; (5) Terdapat kemudahan akses untuk menjangkau kelancaran usaha; (6) Kemudahan akses yang dikembangkan secara berdampingan dapat meningkatkan perbaikan ekonomi masyarakat.

D.6 Pendukung dan Penghambat

Sebuah program perencanaan dapat dipastikan ada pendukung dan penghambat dari keberhasilan program. Berikut pemaparan pendukung dari keberhasilan perencanaan penanggulangan risiko ketimpangan. Keberhasilan program dilihat dari seberapa antusiasme masyarakat dalam menjalani perubahan dan perkembangan untuk perbaikan nasib yang lebih baik. Warga sebagai pelaku utama memiliki kemauan berubah, otomatis program-program pemerintah akan berhasil sesuai yang diharapkan. Serta dukungan para *stakeholder* yang bertanggung jawab dalam terlaksananya program yang telah di sesuaikan masing-masing OPD tersebut.

Sedangkan penghambat dari program-program yang direncanakan pemerintah daerah adalah dari subjek masyarakat sendiri. Faktanya terdapat warga yang mempunyai mental

ketergantungan. Prinsip hidup masyarakat yang tidak punya kemauan untuk berkembang dan memperbaiki nasib serta nyaman akan bantuan yang diterima. Ada pula yang bertahan memilih berada di zona nyaman seperti bekerja sebagai buruh dan kerja ikut orang, tidak ada kemauan untuk melakukan pengembangan dagang atau usaha produktif karena takut risiko.

Pelaksanaan kebijakan dalam menanggulangi ketimpangan dipastikan terdapat kendala dan menyebabkan ketidak berhasilan program secara penuh. Upaya Bappeda yaitu tetap menjalankan program kebijakan disertai pelaksanaan evaluasi.

E. Kesimpulan

Perencanaan penanggulangan resiko ketimpangan ekonomi pada bidang pengurangan kemiskinan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Daerah Istimewa Yogyakarta sudah berjalan secara baik. Perencanaan dengan menerapkan manajemen risiko telah sesuai tahapan perencanaan dan peraturan perundangan serta prinsip dan azas penyusunan perencanaan berdasar pengelolaan risiko seperti pelibatan para pihak berkepentingan, terutama organisasi kelompok miskin, keterbukaan, kerjasama dan kolaborasi.

Pendorong utama keberhasilannya adalah penggunaan teknologi informasi komunikasi berbasis data digital berupa aplikasi jogjaplan.com menjadi akses informasi, data, dan kemudahan kerjasama bagi para pihak berkepentingan dan masyarakat. Sedangkan hal penting untuk diperhatikan lebih lanjut adalah pendekatan kolaborasi dengan multi stake holder, yang tetap menjadikan pemberdayaan terhadap warga masyarakat miskin dalam proses perencanaan tersebut. Selain itu adalah penerapan jogjaplan.com sebagai piranti akses organisasi kelompok belum beruntung tersebut dengan memperjelas peraturan dan dukungan fasilitator secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Buku

- Baldwin, Robert E. 1986. *Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Negara-negara Berkembang* (Cetakan ke-2). Terjemahan St. Dianjung. Jakarta: PT. Bina Aksara
- Basyaib, Fachmi. 2007. *Manajemen Risiko*. Cikal Sakti. Jakarta: Grasindo (Gramedia Widiasarana Indonesia).
- Hanafi, M. Mamduh. 2014. *Manajemen Risiko*. Volume.1, Issue.658.15. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Rustiadi, Ernan. 2018. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Jurnal

- Adi Ardiansyah. 2009. “*Dampak Kemiskinan Kota Terhadap Perumahan dan Permukiman di Kota-Kota Besar Indoensia*”. Artikel Buletin TERAS. 2009. terdapat dalam https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/40196384/ArtikelTERASADI_ARDIANSYA_H.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1554281641&Signature=t5VU8jvi6lLFs%2B2cj3i9CDLNlhw%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3Ddaddie.pdf akses 3 April 2019.
- Bagong Suyanto. 2001. “*Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin*”. Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik. Tahun XIV, No.4, Oktober 2001, 25-42. terdapat dalam http://journal.unair.ac.id/filerPDF/_3_20Bagong.pdf akses 29 Maret 2019.
- Budiantoro Hartono. 2008. “*Analisis ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah*”. Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro Semarang. 2008. terdapat dalam http://eprints.undip.ac.id/16862/1/BUDIANTORO_HARTONO.pdf akses 2 April 2019.
- I G.W.Murjana Yasa. 2012. “*Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Partisipasi Masyarakat di Provinsi Bali*”. Input Jurnal Ekonomi dan Sosial. [S.I], November 2012. terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/43814-ID-penanggulangan-kemiskinan-berbasis-partisipasi-masyarakat-di-provinsi-bali.pdf> akses 29 Maret 2019.
- Purnamasari, Irma. 2008. “*Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi*” Program

- Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. 2008. dalam http://eprints.undip.ac.id/17845/1/IRMA_PURNAMASARI.pdf. akses 26 Agustus 2019.
- Darwanto, Herr. 2009. *"Prinsip Dasar Pembangunan Ekonomi Daerah"*. dalam www.academia.edu/download/34792063/heri_20091015103733_2313-0.doc akses 26 Agustus 2019
- Ibty, I. 2017. *"Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat, Kebutuhan Mitigasi Risiko Pelayanan Publik; Kajian dari Audit Sosial Pemberdayaan"* Jurnal Enersia Publika, I (2); 51-66. terdapat dalam https://ejournal.up45.ac.id/index.php/Jurnal_Enersia_Publika/article/viewFile/344/308U . akses 9 Agustus 2019.
- Idris,K. Syaparuddin & Hodijah, S. 2014. *"Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, Kemiskinan, dan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jambi"*. Jurnal Paradigma Ekonomika. Vol.9, No.1, 1 April 2014. terdapat dalam <https://www.onlinejournal.unja.ac.id/paradigma/article/view/2311/1647> akses 3 April 2019.
- M.Syawie. 2013. *"Ketimpangan Pendapatan dan Penurunan Kesejahteraan Masyarakat"*. Jurnal Informasi. Vol.18, No.02, Tahun 2013. terdapat dalam <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/viewFile/70/39> akses 29 Maret 2019.
- Muhammad Haris Hidayat. 2014. *"Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2012"*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang. 2014. terdapat dalam http://eprints.undip.ac.id/43810/1/20_HI DAYAT.pdf . diakses 13 April 2019.
- BAPPEDA DIY. 2019. *"Mendorong Desa Sebagai Titik Simpul Kolaborasi Multistakeholder dalam Penanggulangan Kemiskinan"*. Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Organisasi Perangkat Daerah). Yogyakarta. 5 Maret 2019.
- Gini Ratio Daerah Istimewa Yogyakarta Bulan Maret 2018 Nomor 40/07/34/Tahun.XX, 16 Juli 2018 terdapat dalam <https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease.html> akses 6 Februari 2019
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2017 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dalam <https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf> akses 9 Juni 2019
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025. dalam. <http://bappeda.jogjapro.go.id/download/download/59> akses 28 Maret 2019
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029.

Dokumen Publik

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintah
yang Menjadi Kewenangan Daerah
Istimewa Yogyakarta

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018
Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2017-2022.

Peraturan Gubernur nomor 45 tahun 2014
tentang Tata Cara Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah dan Pengendalian
Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2015
Tentang Rincian Tugas dan Fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta.

Rencana Strategi BAPPEDA DIY Yogyakarta
Tahun 2017-2022.

Rujukan Internet

Sejarah Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah. terdapat dalam
<http://bappeda.jogjaprov.go.id/page/sejarah-bappeda> akses 24 april 2019

Visi Misi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah. terdapat dalam
<http://bappeda.jogjaprov.go.id/page/visi-misi>. akses 25 april 2019

Dokumen RDP tentang Rancangan Peraturan
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor ... Tentang Penanggulangan
Kemiskinan.
<http://jdih.dprdjogjagov.go.id/page/>
akses 25 april 2019